

**INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGAWASAN
OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

Oleh :

Fiqqi Faisal Wijaya

E1A014088

ABSTRAK

Pembinaan Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak dilakukan secara terpisah yakni oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, hal ini menimbulkan perdebatan secara konseptual dan independensi pengadilan dipertanyakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan yang terjadi dalam Pengadilan Pajak serta pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data-data sekunder yang telah terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif atau deskriptif, dan dianalisis secara metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, implikasi akibat adanya perbedaan pengaturan dalam Pengadilan Pajak mengakibatkan konflik norma. Baik UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung dan UU Pengadilan Pajak berada pada strata yang sejajar namun bila dilihat dari karakteristik undang-undang ini menunjukkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman secara muatan dan tujuan pengaturannya menjadi lebih tinggi dibanding UU Pengadilan Pajak. Dualisme Kepemimpinan yang terjadi dalam Pengadilan Pajak tidak berdampak terhadap Independensi Pengadilan, dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan Pembuktian sebagaimana ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Pajak.

Kata Kunci : Independensi, Pengadilan Pajak, Pengawasan, Kementerian Keuangan

***INDEPENDENCE OF THE TAX COURT TO SUPERVISION BY MINISTRY
OF FINANCE BASED ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002 CONCERNING
THE TAX COURT***

By:

Fiqqi Faisal Wijaya

E1A014088

ABSTRACT

The development of the Tax Court under the Tax Court Law is done separately by the Ministry of Finance and the Supreme Court, this raises the conceptual debate and judicial independence in question. This research is conducted with the aim to know and analyze the differences of arrangements that occur in the Tax Court and the influence of supervision made by the Ministry of Finance of the Tax Court. The research method used is the normative juridical approach. The collected secondary data is processed, presented in the form of narrative or descriptive text, and analyzed by qualitative method.

Based on the results of research and discussion can be concluded that, implications due to differences in the settings in the Tax Court resulting in conflict norms. Both the Law on Judicial Power, the Supreme Court Law and Tax Court Law are in parallel strata but when viewed from the characteristics of this law, it shows that the Law on Judicial Power is in charge and the purpose of the regulation is higher than the Tax Court Law. Leadership Dualism that occurs in the Tax Court does not affect the independence of the Court, in this case the Judge in examining and disputing the dispute based on the evidence as provisions in the Tax Court Law.

Keyword : Independent, Tax Court, Supervision, Ministry of Finance